

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI
KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA KECAMATAN BANGKO PUSAKO
KABUPATEN ROKAN HILIR**

Oleh :

Ridho Arisandi

PEMBIMBING Dra. ERNAWATI. M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28893

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah ikut sertanya masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam tahap perencanaan pembangunan melalui musrenbangkep, tahap pelaksanaan pembangunan, mengevaluasi pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan. Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) masih minim dan pasif, hal ini disebabkan karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang perencanaan pembangunan, tingkat pendidikan yang rendah, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah kemudian tidak mengikutsertakan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan.

Konsep teori yang digunakan adalah Partisipasi. Peneliti menggunakan teori Soetomo. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembangunan di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pengkajian data secara deskriptif. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan *key informan* sebagai sumber informasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik masih sangat minim dan pasif, artinya masih banyak masyarakat yang tidak terlibat dalam setiap tahapan pembangunan yang akan dilaksanakan dan masih menyerahkan semua keputusan kepada pihak lain. Dalam hal ini peneliti menyarankan agar masyarakat berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan pembangunan dan pihak pemerintah juga harus mengupayakan partisipasi masyarakat lebih banyak dan aktif agar ide/gagasan yang datang dari masyarakat lebih banyak sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan serta evaluasi untuk tahun berikutnya.

Kata kunci :Partisipasi, Masyarakat, Pembangunan

**PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI
KEPENGHULUAN BANGKO PUSAKA KECAMATAN BANGKO PUSAKO
KABUPATEN ROKAN HILIR.**

Oleh:

Ridho Arisandi

PEMBIMBING Dra. ERNAWATI. M.Si

Jurusan Ilmu Administrasi – Prodi Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28893

Telp/Fax 0761-63277

ABSTRACT

Community participation of development is the participation of community in the development process both in the planning stage of development through musrenbangkep, the stage of development implementation, evaluate the development and in enjoying the results of development. Community participation in development planning through development planning discussion (musrenbang) is still minimal and passive, due to lack of community understanding of development planning, low education level, and lack of socialization from the government then excludes the community in development planning deliberations.

Participation is used as Theory Concept. The researcher uses Soetomo Theory. This research aimed to know how the community participation of physical development in Kepenghuluan Bangko Jaya Bangko Pusako Subdistrict Rokan Hilir Regency. This research used Qualitative Method with descriptive study of data. Data was collecting by interviewed the key informant as information resource, observation, and documentation.

The result showed that the community participation of physical development is still minimal and passive, that means there are still many people who are not involved in every stage of development that will be implemented and still submit all decisions to other parties. In this case the researcher suggested that the community should participate actively in every stages of development and the government should also seek more and active participation from community, so that the idea comes more from the community and it can be used as consideration and evaluation for the next year.

Keywords: Participation, Community, Development.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses perwujudan cita-cita Negara untuk mewujudkan masyarakat yang makmur sejahtera secara merata diseluruh wilayah Indonesia, pembangunan sebagai upaya meningkatkan derajat kehidupan secara berkelanjutan untuk mampu menentukan nasib ditangannya sendiri, yaitu mencerdaskan manusia dan melepaskan mereka dari ketergantungan pada manusia lain.

Perencanaan pembangunan akan tepat mengenai sasaran, terlaksana dengan baik dan bermanfaat hasilnya jika dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Pembangunan haruslah dilaksanakan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Pandangan ini menunjukkan asas demokrasi dalam konsep pembangunan nasional.

Pembangunan yang berbasis partisipasi masyarakat harus mempunyai karekteristik bottom-up, demikian halnya dengan proses pengambilan keputusan karena masyarakatlah yang mengetahui kebutuhan dan masalah yang dihadapi. Merekalah yang memiliki kebebasan untuk memutuskan pelaksanaan suatu kegiatan pembangunan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa yang diharapkan, diperlukan keterlibatan seluruh masyarakat sebagai pelaku pembangunan karena dengan adanya keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja.

Terkait dengan masalah pembangunan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Menegaskan bahwa sistem perencanaan pembangunan nasional merupakan satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka

panjang, jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan dipusat dandaerah dengan melibatkan masyarakat. Perencanaan pembangunan yang diharapkan merupakan suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Dalam perda Kabupaten Rokan Hilir Nomor 08 Tahun 2009 , Tentang Pembangunan Kawasan Kepenghuluan. Pada pasal 4 ayat 1 dijelaskan “pembangunan kawasan Kepenghuluan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dan atau pihak ketiga mengikut sertakan pemerintah Kepenghuluan, BPK dan lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk partisipasi masyarakat”.

Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir sebagai salah satu wilayah yang terus tumbuh dan berkembang telah melaksanakan berbagai pembangunan disegala sektor seperti kesehatan, pendidikan, sarana dan prasarana, sosial politik, serta kebersihan. Namun masih cukup banyak pelaksanaan pembangunan yang belum dapat mencapai sasaran dan tujuan yang diharapkan oleh para perencana.

adanya komunikasi antara Pemerintah daerah dengan masyarakat ataupun sebaliknya. Dalam pelaksanaan pembangunan Kepenghuluan.

Dari tabel diatas dapat kita lihat bahwa partisipasi masyarakat yang ada di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako tingkat dan bentuk partisipasinya berbeda-beda. Pemberian partisipasi masyarakat lebih cenderung memberikan bantuan tenaga saja. Namun dipihak lain, partisipasi masyarakat ini tidak selamanya tinggi, disuatu waktu adakalanya masyarakat sangat kurang berpartisipasi, baik itu dalam bentuk bantuan tenaga, sumbangan pikiran, waktu dan bantuan material. Lebih

lanjut dikatakan bahwa aspek keterlibatan masih sangat minim sehingga mempengaruhi implementasi dari pembangunan yang direncanakan.

B. Rumusan Masalah

Sebagai mana yang telah diuraikan diatas bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan itu sangat penting karena bisa mempercepat pelaksanaan dari pembangunan yang dilakukan, maka dari itu penulis merumuskan masalah pada penelitian ini yaitu :

1. Bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir?
2. Faktor-Faktor Apa Saja Yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Secara teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan khsanah ilmu pengetahuan.
- b. Secara praktis, di harapkan menjadi salah satu bahan masukan terutama bagi Penghulu di Kepenghukuan Bangko Jaya untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam pembangunan fisik.

- c. Dapat menjadi salah satu bahan referensi bagi mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.

D. Konsep Teori

1. Partisipasi

a. PengertianPartisipasi

Partisipasi oleh banyak kalangan disamakan pengertiannya dengan keikutsertaan, turut serta mengambil bagian.Hal ini menunjukan adanya unsur keterlibatan dari dalam suatu kegiatan.

Menurut Mubyarto (2000:28) partisipasi masyarakat adalah sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program yang dicanangkan oleh pemerintah sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa mengorbankan kepentingan diri sendiri.

Soetomo (2010:09) keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan bukan karena mobilisasi, melainkan sebagai bentuk partisipasi yang dilandasi oleh determinasi dan kesadaran. Pelibatan dalam pengertian partisipasi bukan mobilisasi masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan ialah:

1. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses atau perumusannya. Hal itu mengakibatkan masyarakat meras ikut memiliki program tersebut, sehingga kemudian masyarakat juga mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya.
2. Keterlibatan masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan program juga akan

- membawa dampak positif dalam jangka panjang. Kemandirian masyarakat akan lebih cepat terwujud karena masyarakat menjadi terbiasa untuk mengelola program-program pembangunan pada tingkat lokal.
3. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi akan membawa dampak positif bagi penyempurnaan dan pencarian alternatif yang terus menerus. Hasil evaluasi yang dilakukan akan dapat menjadi umpan balik bagi perbaikan dan penyempurnaan program-program berikutnya.
 4. Partisipasi dalam menikmati hasil, melalui bentuk partisipasi ini hasil-hasil pembangunan dapat dinikmati secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat secara proporsional.

Menurut Marbun dalam Khoiron (2003:31) partisipasi adalah tingkat keterlibatan dan keikutsertaan seseorang berkat sumbangan pikiran dan usulnya sehingga mereka bertanggung jawab atas pekerjaannya sendiri dan ikut berusaha mencapai sasaran suatu tujuan organisasi.

Sementara itu menurut Mashur (2016:190) menyatakan bahwa seluruh warga masyarakat harus selalu bekerja sama, bahu membahu, saling membantu dan mempunyai komitmen moral dan sosial yang tinggi dalam memasyarakatkan gerakan pemberdayaan tersebut dalam semua aspek dan tingkatan. Komitmen itu mencakup:

- a. Perumusan konsep
- b. Penyusunan model
- c. Proses perencanaan
- d. Pelaksanaan gerakan pemberdayaan
- e. Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan, dan
- f. Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan.

2. Pembangunan

- a. Pengertian Administrasi pembangunan

Mashur (2016:63), menyatakan bahwa definisi kerja dari administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu Negara bangsa untuk bertumbuh, berkembang, dan berubah secara sadar dan terencana disemua segi kehidupan dan penghidupan Negara bangsa yang bersangkutan dalam rangka pencapaian tujuan. Todaro (2000:18), menyatakan bahwa pembangunan bukan hanya fenomena semata, namun pada akhirnya pembangunan, namun pada akhirnya pembangunan tersebut harus melampaui sisi materi dan keuangan dari kehidupan manusia.

Menurut Todaro (2000:21), definisi di atas memberikan beberapa implikasi bahwa:

1. Pembangunan bukan hanya diarahkan untuk peningkatan *income*, tetapi juga pemerataan.
2. Pembangunan juga harus memperhatikan aspek kemanusiaan, seperti peningkatan:
 - a. *Life sustenance* yaitu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar.
 - b. *Self-Esteem* yaitu kemampuan untuk menjadi orang yang utuh yang memiliki harga diri, dan
 - c. *Freedom From* Survival yaitu kemampuan untuk melakukan berbagai pilihan dalam hidup, yang tentunya tidak merugikan orang lain.

Dari beberapa definisi perencanaan pembangunan tersebut diambil makna tentang apa yang dimaksud dengan perencanaan pembangunan dan tahap-tahap yang di dalamnya. Kemudian hubungannya dengan konsep pembangunan daerah sebagai tempat proses perencanaan pembangunan. Perencanaan

pembangunan daerah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah dan lingkungannya dalam wilayah atau daerah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tapi tetap berpegang teguh pada azas skala prioritas. Bratakusumah (2004:73).

Menurut Dharmawan (2002:46), prinsip pokok pengembangan masyarakat dimaksud meliputi:

1. *Amelioration*, yaitu semangat untuk memperbaiki keadaan komunitas sehingga hari esok lebih baik dari pada hari ini dan kemarin.
2. *Voluntarism*, adalah prinsip kesukarelaan dan keswadayaan, artinya inisiatif-inisiatif pengembangan komunitas harus menghargai motivasi dari bawah. Mengabaikan prinsip ini maka perencanaan pembangunan akan terjebak kembali pada prinsip pemaksaan.
3. *Working with*, prinsip ini menghargai anggota komunitas lokal sebagai pihak yang memiliki status sejajar dengan pihak siapapun juga.
4. *Translation of commitment to community in the form of community service*, pihak luar menempatkan diri sebagai pelayan dengan semangat pengorbanan demi kemajuan komunitas lokal.
5. *Sustainability*, prinsip ini diturunkan dari idiologi sustainability dalam pengembangan berkelanjutan.

E. Kerangka Berfikir

Dalam hal ini penulis menguraikan alur pikir dengan mendudukan penelitian berdasarkan kajian

kepastakaan sebagai kajian teoritis dari penelitian mengenai “Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir”. Oleh karena itu penelitian ini diuraikan kedalam 4 indikator yaitu:

1. Partisipasi dalam perumusan program.
2. partisipasi dalam pelaksanaan dan pengelolaan program.
3. partisipasi dalam tahap evaluasi
4. partisipasi dalam menikmati hasil. Soetomo (2010:09)

F. Konsep Operasional

Agar terciptanya satu kesatuan pengertian dan keseragaman bahasa serta untuk memepermudah dalam penelitian ini maka penulis perlu memberikan batasan dari beberapa istilah yang dioperasionalkan terlebih dahulu.

1. Partisipasi yang dimaksud disini adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya dalam memberikan sumbangsih pada upaya-upaya pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.
2. Masyarakat yang dimaksud disini adalah warga yang tinggal diKepenghuluan Bangko Jaya
3. Kecamatan yang dimaksud disini adalah Kecamatan Bangko Pusako
4. Pembangunan yang dimaksud disini adalah suatu proses perubahan kearah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.
5. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dimaksud disini adalah keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat dalam proses pembangunan seusuai dengan kemampuan yang dimilikinya, selanjutnya partisipasi masyarakat itu :

- a. Partisipasi dalam perumusan program termasuk pengambilan keputusan maksudnya disini partisipasi masyarakat untuk menghadiri rapat atau musyawarah, memberikan kritik dan sarannya (ide-ide), dan ikut mendukung keputusan yang telah diambil dalam perencanaan pembangunan yang dilakukan di Kepenghuluan Bangko Jaya.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan program pembangunan maksudnya disini partisipasi masyarakat dalam bentuk uang, tenaga, material, dan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan yang dilakukan di Kepenghuluan Bnagko Jaya.
- c. Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan maksudnya adalah bagaimana masyarakat harus mampu memberikan penilaian terhadap hasil dari program-program pembangunan yang telah dilakukan oleh Kepenghuluan Bangko Jaya.
- d. Partispasi dalam pemeliharaan hasil-hasil pembangunan maksudnya disini partisipasi masyarakat untuk bergotong royong membersihkan hasil

pembangunan, memperbaiki, menjaga, serta memanfaatkan dari pembangunan yang dilakukan di Kepenghuluan Bnagko Jaya.

G. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dari penelitian ini adalah Kabupaten Rokan Hilir yang mana Kabupaten Rokan Hilir merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang satu daratan dengan ibu kota Provinsi Riau.

Adapun fokus penelitian nantinya ditempatkan di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir. Dimana wilayah Kepenghuluan Bangko Jaya merupakan Kepenghuluan yang sedang berkembang dan terindikasi keterbelakangan pembangunan terutama dalam pembangunan fisik.

2. Informan Penelitian

Untuk memperoleh data guna kepentingan penelitian ini, maka diperlukan informan. Pemilihan informan dalam penelitian ini diambil dengan maksud atau tujuan tertentu, yang mana menganggap bahwa subjek penelitian yang diambil tersebut memiliki informasi yang diperlukan bagi penelitian yang akan dilakukan ini.

Selain itu pemilihan informan dalam penelitian yang akan dilakukan ini disesuaikan dengan tujuan, dan permasalahan penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir, yaitu:

1. Penghulu Bangko Jaya.
2. Sekretaris Kepenghuluan Bangko Jaya
3. BPK (Badan Permusyawaratan Kepenghuluan).
4. Kaur pembangunan Bangko Jaya
5. Kepala Dusun

6. Masyarakat Kecamatan Bangko Pusaka.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha pengambilan data yang diperlukan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, yaitu cara mengumpulkan data yang berdasarkan atas tinjauan dan pengamatan penelitian secara langsung terhadap aspek-aspek yang terkait dengan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
2. Interview atau wawancara, yaitu tindakan dalam melakukan Tanya jawab secara langsung dengan informan yang telah dipilih dalam hal pengumpulan informasi yang relevan.
3. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen atau gambar.

4. Jenis Data

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Data sekunder, adalah data yang diperoleh melalui study pustaka (*library research*) untuk mengumpulkan data-data melalui buku-buku, peraturan-peraturan, serta dokumen-dokumen yang ada relevansinya dengan penelitian.
- b. Data primer, adalah data yang diperoleh dengan melakukan penelitian secara langsung melalui wawancara dengan informan dengan mengajukan daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penelitian.

5. Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan studi pustaka dalam penelitian ini

selanjutnya akan dianalisis secara kualitatif. Metode ini ditujukan untuk memahami gejala masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, mengenai peran serta masyarakat dalam proses pembangunan yang difokuskan pada pelaksanaan pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kepenghuluan Bangko Jaya

Awal mula terbentuknya daerah dan nama Bangko Jaya dahulunya merupakan sebuah daerah yang kosong yang tidak ada penghuninya dan berada di daerah dataran. Masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya mulanya 60% berasal dari daerah Bangko Kanan dan Bangko Kiri dan 40% berasal dari daerah sumatra utara. Dikarenakan daerah tersebut kepadatan penduduknya sudah mulai tinggi maka sebagian masyarakatnya mulai mencari tempat untuk mengadu nasib agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik kedepannya.

Kemudian pada tahun 1999 sampai tahun 2001 Kabupaten Bengkalis mengalami pemekaran yaitu salah satunya Kabupaten Rokan Hilir dimana Kecamatan Rimba Melintang termasuk kedalamnya dan dimekarkan juga pada tahun 2001 menjadi Kecamatan Bangko Pusako. Dan akhirnya Kepenghuluan Bangko Jaya tergabung kedalam Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2001 hingga saat ini.

Awal pemerintahan Kepenghuluan Bangko Jaya dimulai pada tahun 1995, di masa orde baru. Adapun orang-orang yang pernah menjabat sebagai Penghulu Bangko Pusako diantaranya:

1. Penghulu Daud Djalil tahun 1981 - 2003
2. Penghulu Zulkarnain tahun 2004 - 2014

Penghulu Ratna S.Pd tahun 2015 sampai sekarang

B. Letak dan Keadaan Geografis Kepenghuluan Bangko Jaya

Kepenghuluan Bangko Jaya merupakan salah satu Kepenghuluan yang berada dalam wilayah Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau dengan total luas wilayah ± 675 km dengan tekstur tanah dataran tinggi dan dataran rendah, dimana digunakan oleh masyarakat sebagai lahan pertanian, lahan perkebunan, lahan pemukiman, lahan fasilitas umum dan perkantoran. Kepenghuluan Bangko Jaya memiliki hawa udara yang cukup tinggi dan sangat panas yakni 22°C sampai 39°C . Pergantian musim di Kepenghuluan Bangko Jaya tidak jauh berbeda dengan daerah lainnya yaitu musim penghujan dan musim kemarau (kering). Untuk mencapai Kepenghuluan Bangko Jaya tidaklah sulit dan boleh dikatakan sangatlah mudah sebab Kepenghuluan Bangko Jaya memiliki arus transportasi yang sangat lancar yaitu melalui jalur darat.

Adapun batas-batas Kepenghuluan Bangko Jaya sebagai berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Permata
2. Sebelah barat berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Bhakti.
3. Sebelah utara berbatasan dengan Bangko Kanan
4. Sebelah selatan berbatasan dengan Kepenghuluan Bangko Pusaka

Adapun jarak kantor Kepenghuluan Bangko Jaya ke kantor Kecamatan Bangko Pusako ± 15 km, sedangkan ke ibukota Kabupaten Rokan Hilir yaitu Bagan Siapi-api ± 90 km, kemudian jarak Kepenghuluan Bangko Jaya dengan ibu kota Provinsi Riau yaitu Pekanbaru ± 290 km. Faktor jarak tersebut tidak menjadi penghambat dalam arus transportasi, hal ini dikarenakan kondisi jalan yang sudah baik dan mudah dilalui dengan angkutan umum maupun kendaraan pribadi.

C. Keadaan Demografi Kepenghuluan Bangko Jaya

1. Jumlah Penduduk

Dapat kita ketahui bahwa dusun yang terluas di Kepenghuluan Bangko Jaya ialah Dusun Wonerejo dengan luas $\pm 315,3$ km² dan memiliki jumlah RT terbanyak diantara dusun-dusun yang lainnya, kemudian dusun yang terkecil ialah Dusun Sepakat dengan luas $\pm 105,5$ km².

Jumlah penduduk Kepenghuluan Bangko Jaya yang berjumlah ± 4455 jiwa dan 973 Kepala Keluarga bila di lihat dari jenis kelamin 2550 jiwa adalah berjenis kelamin laki-laki dan 1905 jiwa berjenis kelamin perempuan. Adapun rincian mengenai jumlah penduduk Kepenghuluan Bangko Pusaka bila dilihat dari jenis kelamin adalah sebagai berikut:

**Tabel II.3 : Jumlah penduduk
Kepenghuluan Bangko Jaya bila
dilihat dari jenis kelamin**

1. Mata Pencaharian

Mata pencaharian bagi masyarakat merupakan faktor yang sangat penting sebagai upaya untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari, begitu pula bagi masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya. Dimana pada umumnya mata pencaharian masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya masih bergantung pada keadaan alam. Tepatnya mata pencaharian masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel II.4 : Jumlah penduduk
Kepenghuluan Bangko Jaya
berdasarkan mata pencaharian**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (orang)
1	Petani	1020
2	Buruh	432
3	Nelayan	-
4	Pedagang/Wiraswasta	515
5	Pegawai Negeri/Honorer	202
6	Dan lain-lain	343
	Jumlah	2512

No	Agama	Jumlah
1	Islam	4109
2	Kristen	346
3	Hindu	-
4	Budha	-
	Jumlah	4455

Sumber : Kantor Kepenghuluan Bangko Jaya, 2016

Dari tabel II.4 menunjukkan bahwa mata pencaharian atau jenis pekerjaan penduduk yang ada di Kepenghuluan Bangko Jaya yang terbanyak adalah berprofesi sebagai petani terutama petani kelapa sawit dan karet dengan jumlah 1020 orang, disusul dengan berprofesi pedagang/wiraswasta baik rumahan maupun di pasar dengan jumlah 515 orang, kemudian buruh dengan jumlah 432 orang, dan yang terakhir yaitu berprofesi sebagai pegawai negeri/honorer menempati jumlah yang paling sedikit dengan jumlah 202 orang.

2. Tingkat Pendidikan

Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yakni untuk mewujudkan masyarakat yang berbudi luhur, berkepribadian, pekerja keras, tangguh, serta tanggung jawab. Selanjutnya pendidikan akan berpengaruh pada tingkat

kesejahteraan penduduk umumnya begitu juga dengan penduduk Kepenghuluan Bangko Jaya. Untuk mengetahui tingkat pendidikan penduduk Kepenghuluan Bangko Jaya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.5 : Jumlah penduduk Kepenghuluan Bangko Jaya berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)
1	Belum/Tidak sekolah	812
2	Tamat SD	1255
3	Tamat SMP	918
4	Tamat SMA	1123
5	Tamat Akademi/Perguruan Tinggi	347
	Jumlah	4455

Sumber : Kantor Kepenghuluan Bangko Jaya, 2016

Tabel II.6 : Jumlah sarana pendidikan di Kepenghuluan Bangko Jaya

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SMA/SMK	2
2	SMP/MTs	2
3	SD	3
4	TK	3
5	MDA	3

Sumber : Kantor Kepenghuluan Bangko Jaya, 2016

Tersedianya tiga Sekolah Dasar (SD) di Kepenghuluan Bangko Jaya mempengaruhi tingkat pendidikan masyarakat setempat terbukti hampir 35% masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya tamat Sekolah Dasar (SD). Ini dapat disimpulkan bahwa tersedianya sarana pendidikan akan menunjang

tingginya tingkat pendidikan di Kepenghuluan tersebut.

2. Agama

Sebagai pegangan hidup dan bimbingan dalam menempuh segala fenomena kehidupan, agama sangatlah diperlukan bagi setiap masyarakat, apalagi aturan hukum kerap kali tidak menjangkau wilayah di Kepenghuluan, maka dari itu peran agamalah yang sangat menentukan keterlibatan kehidupan masyarakat di Kepenghuluan. Untuk mengetahui keadaan agama masyarakat di Kepenghuluan Bangko Jaya dapat kita lihat pada tabel berikut:

Tabel II.7 : Jumlah kepercayaan/agama masyarakat di Kepenghuluan Bangko Jaya

D. Struktur Pemerintahan Kepenghuluan Bangko Jaya

Pembangunan Kepenghuluan Bangko Jaya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang mempunyai arti yang sangat strategis karena secara keseluruhan merupakan basis atau landasan ketahanan nasional bagi seluruh Kesatuan Negara Republik Indonesia.

Keberhasilan pembangunan Kepenghuluan sangat ditentukan oleh keterlibatan aparat pemerintah kepenghuluan. Untuk lebih mengetahui struktur pemerintah Kepenghuluan Bangko Pusaka dapat kita lihat pada gambar berikut ini:

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

Partisipasi dalam pembangunan dapat diterapkan dalam keikutsertaan pada proses-proses pembangunan, dimulai dari perencanaan pembangunan, pelaksanaan pembangunan, evaluasi pembangunan, dan menikmati hasil pembangunan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif

dari masyarakat berupa ide/gagasan yang menyangkut kepentingan bersama. Manfaat dari perencanaan ini diantaranya adalah standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan. Adapun bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan misalnya dalam menyumbangkan gagasan ataupun pemikiran, kehadiran dalam rapat (musrenbangkep), diskusi dan tanggapan atau perwakilan terhadap program yang ditawarkan.

Dalam penelitian ini terdiri atas dua bagian utama yaitu:

A. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Busako Kabupaten Rokan Hilir.

1. Partisipasi masyarakat dalam perumusan/perencanaan pembangunan.
2. Partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan dan pengelolaan pembangunan.
3. Partisipasi masyarakat dalam tahap evaluasi pembangunan.
4. Partisipasi dalam menikmati hasil pembangunan.

B. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik.

Berikut ini hasil dari penelitian yang penulis lakukan di Kepenghuluan Bangko Pusaka Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir:

Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan

Tahapan awal dalam pembangunan adalah perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan itu sendiri dapat melalui pelaksanaan forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kepenghuluan (Musrenbangkep). Namun musrenbangkep tahun 2016 di Kepenghuluan Bangko Jaya tidak dilaksanakan, hal ini dikarenakan

pembangunan di Kepenghuluan Bangko Jaya pada tahun 2016 menggunakan ADD. Dimana program ADD pada tahun 2016 itu adalah program kedua kalinya dan dikatakan program baru, selain itu jangka waktu yang sangat singkat untuk melakukan perencanaan pembangunan yang ditentukan oleh Bapenas membuat pihak pemerintah kepenghuluan tidak mengadakan musrenbangkep. Seperti yang diungkapkan oleh Penghulu Kepenghuluan Bangko Jaya berikut ini : *“...Dalam perencanaan pembangunan kepenghuluan seharusnya diadakan musyawarah perencanaan pembangunan kepenghuluan atau yang lebih kita kenal musrenbangkep, tapi untuk pembangunan tahun 2016 menggunakan ADK. Dimana program ADK ini masih baru dan masih kedua kalinya di laksanakan, kemudian selain itu waktu yang ditentukan untuk merencanakan pembangunan juga sangat singkat maka kami dari pihak pemerintah kepenghuluan mengambil keputusan untuk tidak mengadakan musrenbangkep tetapi kami mengadakan rapat kecil kepada staf kepenghuluan, BPK, dan tokoh masyarakat....”* (**wawancara kepada Penghulu Bangko Jaya pada hari Kamis, 04 oktober 2017, pukul 11:15 Wib**)

Berdasarkan wawancara dengan Penghulu Bangko Jaya dapat diketahui bahwa pihak pemerintah Kepenghuluan Bangko Jaya tidak mengadakan musrenbangkep untuk tahun 2016 dikarenakan pembangunan tahun 2016 menggunakan Alokasi Dana Kepenghuluan(ADK) dimana program ADK masih baru dan masih kedua kalinya dilaksanakan pada tahun 2015 dan 2016. Kemudian pihak pemerintah Kepenghuluan Bangko Jaya mengadakan rapat kecil sebagai pengganti musrenbangkep pada tahun 2016.

Pelaksanaan musrenbangkep di Kepenghuluan Bangko Jaya biasanya dihadiri oleh pihak-pihak seperti :

1. Pihak pemerintah Kepenghuluan
2. Lembaga Kepenghuluan
3. RT dan RW
4. Tokoh masyarakat
5. Organisasi sosial seperti PKK, Karang Taruna, Pemuda dan Olahraga
6. Kelompok masyarakat yang terdapat di Kepenghuluan Bangko Jaya

Sedangkan rapat kecil sebagai pengganti musrenbangkep tahun 2015 hanya dihadiri oleh pihak-pihak seperti :

1. Pihak pemerintah Kepenghuluan
2. Lembaga Kepenghuluan yaitu BPK
3. Tokoh masyarakat dari masing-masing dusun

Diketahui pula bahwa pada saat rapat kecil ADK tahun 2016 perwakilan masyarakat yang hadir juga memberikan beberapa usulan, namun sedikit sekali usulan mereka yang dapat direalisasikan oleh pihak pemerintah Kepenghuluan. Mungkin hal ini yang membuat perwakilan masyarakat tersebut menjadi pesimis dalam memberikan usulannya, mereka menganggap usulan yang mereka sampaikan hanya sia-sia saja. Padahal sebenarnya usulan mereka di tahun 2016 bisa kemungkinan akan direalisasikan di tahun 2017 melalui ADK tahun 2017 karena program ADK adalah program berkelanjutan. Berikut ini daftar usulan rapat kecil Kepenghuluan Bangko Jaya pada tahun 2016.

1. Box covert
2. Pagar PDTA
3. Pencucian kanal
4. Grenase

Dari data diatas dapat kita lihat bahwa usulan dari pihak perwakilan masyarakat dalam rapat kecil tahun 2016 masih sebagian kecil yang terealisasi yaitu pembangunan box covert 6 unit yang terealisasikan, sedangkan usulan yang lainnya belum

dapat direalisasikan oleh pihak pemerintah kepenghuluan karena faktor minimnya anggaran. Hal ini lah yang membuat perwakilan dari masyarakat menjadi pesimis meraka menganggap bahwa mereka sia-sia saja dalam memberikan aspirasi seperti ide/gagasan dan saran dalam menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Pembangunan

Partisipasi dalam pelaksanaan opsional pembangunan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi koordinasi dari penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam perencanaan yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dalam perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Dalam berpartisipasi masyarakat dapat bersikap aktif dan pasif.

Pemerintah Kepenghuluan Bangko Jaya melaksanakan pembangunan fisik di setiap dusun yang ada di Kepenghuluan Bangko Jaya. Diantaranya seperti Box covert, Sumur bor, Semenisasi jalan, Terali dan parkir kantor Kepenghuluan Bangko Jaya, MCK TK Tunas Jaya. Pembangunan-pembangunan tersebut merupakan pembangunan yang menggunakan ADK tahun 2016 bukan berasal dari bantuan pemerintah pusat. ADK Tahun 2016 juga belum ada pembangunan yang mengarah ke pembangunan non fisik seperti bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Hal ini dikarenakan pihak pemerintah mengikuti arahan dari Bapennas sebab ADK tahun 2016 ini masih program baru dan masyarakat maupun pemerintah Kepenghuluan juga masih belum terlalu banyak mengerti dengan program ADK tersebut.

Partisipasi Masyarakat dalam Mengevaluasi Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam mengevaluasi pembangunan merupakan keterlibatan masyarakat dalam menilai

sejauh mana pelaksanaan pembangunan sesuai dengan rencana dan sejauh mana hasilnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk memenuhi ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Dalam berpartisipasi menilai pembangunan masyarakat dapat bersikap aktif dan pasif.

Seperti pembahasan yang sebelumnya, bahwa masyarakat di Kepenghuluan Bangko Jaya ikut serta terlibat dalam pembangunan fisik seperti pembangunan box covert, sumur bor, terali dan parkir kantor Kepenghuluan Bangko Jaya, MCK TK Tunas Jaya, semenisasi jalan. Namun keterlibatan masyarakat dalam kegiatan pembangunan fisik bukan lah kegiatan yang berasal dari APBD Kabupaten, melainkan kegiatan yang berasal dari pihak Kepenghuluan melalui dana ADK tahun 2016.

Berikut ini hasil wawancara dari masyarakat di Kepenghuluan Bangko Jaya dalam menilai pembangunan fisik melalui ADK tahun 2016 yang telah dilaksanakan di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusaka Kabupaten Rokan Hilir.

Partisipasi Masyarakat dalam Menikmati Hasil Pembangunan

Partisipasi masyarakat dalam menikmati dan memanfaatkan hasil pembangunan dapat diartikan sebagai peran masyarakat dalam merawat, memelihara, dan menjaga hasil pembangunan tersebut agar hasil pembangunan yang telah direncanakan kemudian dilaksanakan, dan dievaluasi dapat digunakan setiap saat dan berlangsung lama. Sebab masyarakat merupakan objek yang terlibat langsung dalam penggunaan dan pemeliharaan hasil pembangunan.

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya Kecamatan Bangko Pusako Kabupaten Rokan Hilir

1. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi suatu program partisipasi yang akan dilaksanakan.

2. Faktor Internal

Faktor internal merupakan faktor dari dalam kelompok masyarakat itu sendiri, yaitu individu-individu dan kesatuan kelompok didalamnya yang mempengaruhi masyarakat untuk ikut dalam suatu pembangunan fisik yang akan dilaksanakan bersama

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat Kepenghuluan Bangko Jaya masih dikatakan pasif. Hal ini disebabkan karena kurangnya komunikasi antara pemerintah kepenghuluan dengan masyarakat, yang membuat program-program pembangunan yang dilakukan tidak berjalan dengan baik, selain itu dikarenakan program ADK ini masih program baru dan baru pertama kalinya dilaksanakan maka masih banyak terjadi kekurangan dalam menjalankan program tersebut.

2. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik

Faktor internal yang sangat mempengaruhi dalam pembangunan fisik ialah faktor usia dan lamanya tinggal. Sebab faktor ini sangat menentukan partisipasi dilapangan pada saat kegiatan, serta faktor lamanya tinggal juga mempengaruhi partisipasi dilapangan, karena lamanya tinggal akan mempengaruhi rasa kepedulian terhadap lingkungan sekitar dan juga kekeluargaan yang baik terhadap masyarakat sekitar.

Faktor eksternal yang sangat mempengaruhi partisipasi dalam pembangunan fisik ialah komunikasi. Faktor ini sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat karena faktor komunikasi di butuhkan dalam penyampaian informasi kegiatan kepada masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dilapangan. Faktor kesempatan berpartisipasi sangat dibutuhkan guna menumbuhkan rasa kepercayaan diri seseorang dalam penyampaian ide ataupun tenaga dalam pembangaunan fisik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan, maka peneliti mengajukan beberapa saran sebagai masukan:

1. Diharapkan kepada masyarakat supaya lebih meningkatkan lagi

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan yang telah di ungkapkan pada sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik di Kepenghuluan Bangko Jaya adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik

Partisipasi dalam bentuk memberikan ide/saran dalam perencanaan pembangunan fisik masih pasif hal ini terlihat tidak adanya musrenbangkep tahun 2016. Sedangkan dalam bentuk tenaga sudah cukup baik dengan adanya program ADK yang menggunakan sistem swakelola. Kemudian dalam bentuk evaluasi pembangunan dan dalam menikmati hasil pembangunan masih pasif.

- partisipasinya terhadap pembangunan fisik agar pembangunan fisik yang dilakukan berjalan dengan baik.
2. Diharapkan kepada masyarakat supaya untuk lebih peduli lagi terhadap perencanaan pembangunan, yaitu dengan menyampaikan ide/gagasan dalam musrenbang atau pun dalam musyawarah/rapat yang lain dalam menentukan setiap kegiatan yang akan di laksanakan di lingkungannya, kemudian selain itu harus ikut terlibat dalam pelaksanaan sampai dengan pemeliharaan hasil pembangunan
 3. Diharapkan kepada pihak Kepenghuluan untuk lebih mengedepankan terhadap kebutuhan masyarakat dan tidak mengabaikan keberadaan masyarakat dalam menentukan program-program pembangunan yang akan dilaksanakan dengan cara mengikutsertakan masyarakat dalam perencanaan pembangunan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan pembangunan, agar jalannya program pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat
 4. Diharapkan pihak Kepenghuluan agar dapat mensinkronisasikan program-program dengan dua pendekatan yaitu *top-down* dan *bottom-up* dalam menentukan arahan strategis dan prioritas program terkait dengan perencanaan pembangunan agar saling melengkapi.
 5. Diharapkan kepada pihak Kepenghuluan untuk mensosialisasikan setiap program yang akan dilaksanakan kepada seluruh masyarakat, agar masyarakat paham dengan maksud dan tujuan program-program akan dilaksanakan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ach. Wazir Ws, et al., ed. 1999. *Panduan Penguatan Menejemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: PTGamediaPustaka utama.
- Arimbi. 2002. *Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan*. Jakarta: WALHI.
- Dharmawan. A. H. 2002. *Pengembangan Komunitas dan Pedesaan Berkelanjutan*. Bogor: Jurusan Ilmu Sosial Ekonomi IPB.
- Dwiyanto, Agus. dkk. (2002). *Reformasi Budaya Reformasi di Indonesia*. Yogyakarta: Pusat Kajian Kebijakan dan Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Handayani, Suci. 2006. *Perlibatan Masyarakat Marginal Dalam Perencanaan dan Penganggaran Partisipasi*. Surakarta: Kompip Solo.
- Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika
- Holil, Sulaiman. 1990. *Partisipasi Masyarakat Dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*. Jakarta: Pradya Paramita.
- Huraerah Abu. 2008. *Pengorganisasian, Pengembangan Masyarakat Model dan Strategi Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
- Isbandi Rukminto Adi. 2007. *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP UI Press.
- Iskandar, Huraerah. 2004. *Teori dan Isu Pembangunan*. Bandung: Puspaga
- Johannes Muller. 2006. *Perkembangan Masyarakat Lintas-Ilmu*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian*

- Program Pembangunan*, Jakarta: UI Press.
- Loekman Soetrisno. 1998. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mashur, Dadang. 2016. *Administrasi pembangunan*. Pekanbaru: Alaf Riau Pekanbaru.
- Mikkelsen, Britha. 2001. *Metode Penelitian Partispatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Jakarta: Yayasan OborIndonesia.
- Mubyarto. 2000. *Administrasi pembangunan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Mulyadi, Mohammad. 2009. *Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan*. Jakarta: Nadi Pustaka.
- Riyadi&Dedy Supriyady Bratakusumah. 2004. *PerencanaanPembangunan Daerah:Strategi MenggaliPotensidalamMewujudk an Otonomi Daerah*, Jakarta: PTGamediaPustaka utama.
- Slamet, M. 2003. *Membentuk Pola Perilaku Manusia Pembangunan*. Bogor: IPB Pres.
- Sastropetro, RA. Santoso. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Soejono, Soekanto. 2002. *Kamus Sosiologi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetomo. 2010. *Strategi-strategi pembangunan masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suryono, Agus. 2001. *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press.
- Supriady, Deddy dan Riyadi. 2005. *Perencanaan Pembangunan Derah*. Jakarta: SUN.
- Tjokroamidjoyo, Bintoro. 2001. *PerencanaaPembangunan*. Jakarta: Gunung Agung.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Yuwono, Teguh. 2001. *Manajemen Otonomi Daerah : Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru*. Semarang: Clyapps Diponegoro University

Karya Ilmiah :

- Biztama, Ave. 2012. *Studi Tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Fisik di Kepenghuluan Pujud Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir*. Program Studi Administrasi Negara. Pekanbaru. Universitas Riau.
- Santi, Arie. 2014. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Objek Wisata Pulau Penyengat Kota Tanjung Pinang*. Program Studi Administrasi Negara. Universitas Riau.
- Wijayanti, Asri. 2016. *Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru Tahun 2013-2014*. Program Studi Administrasi Negara. Pekanbaru. Universitas Riau.

Dokumen lainnya :

- UU Negara Republik Indonesia No 32 Tahun 2004 Tentang Desa
- Perda Kabupaten Rokan Hilir No 08 Tahun 2009 Tentang Pembnagunan Kawasan Kepenghuluan